

BAB V

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI

5.1 Simpulan Umum

Partai politik merupakan lembaga politik tempat warga negara menyalurkan berbagai aspirasi politiknya guna turut serta membangun negara menuju masyarakat yang adil dan sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dalam segala bidang kehidupan. Terbukanya kebebasan dalam perpolitikan membawa implikasi yang ditandai dengan munculnya berbagai jenis partai politik di tanah air. Dari dua partai politik (PDI dan PPP) dan satu Golongan Karya (Golkar) pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Kini, setelah masa reformasi jumlah partai politik tidak stabil.

PDI Perjuangan sebagai salah satu partai senior dalam percaturan perpolitikan di Indonesia telah banyak mengalami hambatan dan juga rintangan sesuai dengan dinamika suhu perpolitikan yang sedang bergulir. Mulai dari proses penggabungan (fusi) lima partai yakni Partai Katolik, Parkindo, PNI, Murba dan IPKI pada tahun 1970 yang disebut dengan Kelompok Nasionalis. Kemudian pada tanggal 10 Januari 1973, barulah Kelompok Nasionalis ini berubah dengan nama Partai Demokrasi Indonesia (PDI) dan pada tahun 1999 berubah nama lagi menjadi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) sampai sekarang.

Sebagai partai senior, PDI Perjuangan berperan penting dalam memberikan pendidikan politik terhadap kader, pengurus, simpatisan dan masyarakat luas dalam bentuk pelatihan, seminar, diskusi politik, rapat partai, diklat serta memberikan informasi yang berkaitan dengan perpolitikan guna memberikan pemahaman kepada seluruh masyarakat Indonesia terutama di Kabupaten Sintang tentang politik. Disamping itu juga pelaksanaan pendidikan politik yang dilakukan oleh PDI Perjuangan merupakan amanah yang implementasinya tidak bisa ditawar sebab sebagaimana yang termuat di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 terutama pada pasal 12 huruf (e) menyatakan bahwa “Partai politik berkewajiban melakukan pendidikan politik dan menyalurkan aspirasi politik anggotanya”.

Bagi PDI Perjuangan keharusan untuk melaksanakan pendidikan politik sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 di

atas telah diakomodir dalam Anggaran Dasar partai pada pasal delapan mengenai fungsi partai terutama dalam ayat satu, dua dan lima secara berturut-turut: Ayat satu “Sarana guna membentuk dan membangun karakter bangsa”. Ayat dua “Mendidik dan mencerdaskan rakyat agar bertanggung jawab menggunakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara”. Ayat lima “Melakukan komunikasi dan partisipasi politik warga negara”.

Pendidikan politik yang dilaksanakan oleh PDI Perjuangan bertujuan untuk memberikan pemahaman dan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam bidang politik, yakni untuk melaksanakan hak dan kewajibannya secara suka rela dan penuh tanggung jawab sebagai warga negara yang baik. Pengertian warga negara yang baik adalah warga negara yang siap sedia melaksanakan kewajibannya berupa taat membayar pajak, memberikan suara ketika pelaksanaan pemilu, mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, melakukan pengawasan (*controlling*) terhadap kebijakan pemerintah melalui cara-cara yang demokratis, menggunakan media cetak maupun elektronik, menggunakan baliho (spanduk), serta melakukan demonstrasi secara santun.

Proses pendidikan politik yang dilakukan oleh PDI Perjuangan juga bertujuan membentuk karakter bangsa Indonesia yang lebih bermartabat, santun dan bijak dimana dalam implementasinya menerapkan konsep Pendidikan Kewarganegaraan terutama konsep Pendidikan Kewarganegaraan kemasyarakatan. Konsep Pendidikan Kewarganegaraan tidak hanya memberikan pembinaan dan pengajaran di sekolah semata, melainkan menerapkan pengajaran serta pembinaan di masyarakat supaya masyarakat Indonesia bisa menjadi manusia yang berkarakter, religius, cakap, rela berkorban, kreatif, inovatif, berakhlak mulia, berbudi pekerti luhur, serta bertanggung jawab terhadap dirinya, Tuhan, keluarga, lingkungan sekitar, masyarakat, bangsa maupun negara.

Adapun tujuan dari Pendidikan Kewarganegaraan pada dasarnya ingin membentuk manusia Indonesia seutuhnya, yakni manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing, rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara, saling menghargai dan menghormati dalam kemajemukan, serta membentuk watak keperibadian yang baik, yakni (a) menambah pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), (b)

mengembangkan keterampilan kewarganegaraan (*civic skill*), (c) meningkatkan partisipasi kewarganegaraan (*civic partisipation*), (d) karakter/watak/tabi'at warga negara (*civic disposition*).

5.2 Simpulan Khusus

Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis, ditemukan bahwa PDI Perjuangan sering (paling sering sekali dalam setahun) melakukan pendidikan politik kepada pengurus, kader, serta simpatisan dan untuk selanjutnya kader tersebut yang memberikan pendidikan politik kepada masyarakat luas terutama di daerah pemilihannya masing-masing melalui berbagai kegiatan.

Bentuk program pendidikan politik yang dilaksanakan oleh PDI Perjuangan di Kabupaten Sintang, diantaranya mengadakan pertemuan dengan pengurus, kader, simpatisan, dan masyarakat sipil dimana pelaksanaannya secara hirarkis mulai dari yang tertinggi (tingkat pusat) sampai pada level yang rendah (daerah). Adapun bentuk pertemuan tersebut di mulai dari Kongres (tingkat pusat), Konferda (tingkat provinsi), Konfercab (tingkat kabupaten/kota), Musancab (tingkat kecamatan), Musyawarah Ranting (tingkat desa/kelurahan), dan Musyawarah Anak Ranting (tingkat dusun, RT dan RW). Bentuk kegiatan lainnya adalah seminar, pelatihan kepemimpinan, diskusi politik, memberikan informasi politik, serta diklat.

Pelaksanaan pendidikan politik tersebut disesuaikan dengan kegiatan partai, yakni pada iven-iven tertentu, dan yang lebih intensif menjelang pemilihan umum, baik Pilkada maupun Pilpres. Namun, yang lebih umum biasanya dilaksanakan setiap tahun.

Tujuan pendidikan politik yang dilaksanakan oleh PDI Perjuangan adalah ingin membentuk karakter bertanggung jawab warga negara, supaya:

- (a) masyarakat menyadari, memahami serta mau secara suka rela melaksanakan hak dan kewajibannya terutama dalam bidang politik, (b) supaya PDI Perjuangan semakin dikenal dan dicintai pengurus, kader, simpatisan dan masyarakat luas, (c) memberikan pemahaman terhadap empat pilar kebangsaan Indonesia, yakni Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI, dan Bhennika Tunggal Ika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Selain dari pada itu dengan adanya pendidikan politik diharapkan rasa nasionalisme kader, pengurus, simpatisan dan masyarakat luas tidak

pudar mengingat wilayah Kabupaten Sintang yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia.

Dari berbagai aktivitas pendidikan politik yang dilakukan oleh PDI Perjuangan, terdapat beberapa kendala yang dihadapi, diantaranya biaya atau dana yang minim, wilayah Kabupaten Sintang yang luas, kurangnya koordinasi diantara pengurus, kader serta simpatisan, infrastruktur jalan dan informasi yang belum memadai, dan waktu yang sulit diatur.

Untuk itu solusi yang dilakukan guna mengatasi kendala tersebut adalah (a) memotong gaji pengurus, dan kader partai yang berhasil menduduki jabatan legeslatif, dan eksekutif, baik pada tingkat kabupaten, provinsi dan pusat serta ada juga bantuan dari pemerintah, perseorangan dan perusahaan, (b) membangun komunikasi yang baik diantara sesama pengurus, kader, dan simpatisan, yakni dengan melakukan pertemuan mulai dari tingkat pusat sampai daerah, (c) menyelipkan kegiatan pendidikan politik dalam kegiatan yang lainnya sehingga waktu bisa lebih efektif dan efisien.

Adapun hasil dari pendidikan politik yang dilakukan oleh PDI Perjuangan diantaranya adalah (a) sejak tahun 1999 sampai 2014 massa pendukung partai ini tidak pernah sedikit karena setiap pemilu selalu mendapatkan kursi di parlemen terutama pada pemilu 2014 (baik legeslatif dan eksekutif) partai ini berhasil keluar sebagai pemenang. Hal ini disinyalir sebagai bentuk keberhasilan dari pendidikan politik yang dibangun selama kurang lebih 15 tahun terakhir (1999-2014) dimana saat partai ini berada di luar pemerintahan sebagai partai oposisi atau partai penyeimbang, (b) masyarakat sudah ada yang berani secara terang-terangan mengaku sebagai pengurus partai yang dibuktikan dengan Kartu Anggota.

5.3 Implikasi

Adapun bentuk pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik terutama PDI Perjuangan kepada pengurus, kader, dan simpatisan adalah:

- a. Melakukan rekrutmen anggota secara selektif.
- b. Mengadakan pelatihan kepemimpinan dan manajerial partai.
- c. Melaksanakan diskusi politik.

Juri, 2015

MEMBENTUK KARAKTER BERTANGGUNG JAWAB WARGA NEGARA MELALUI PENDIDIKAN POLITIK

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

- d. Melaksanakan rapat partai secara rutin.
- e. Memberikan kesempatan kepada kader baru dan kader muda untuk menempati posisi sebagai pengurus partai.
- f. Memberikan kesempatan kepada kader dan pengurus untuk dicalonkan dan mencalonkan diri dalam jabatan legeslatif maupun eksekutif pada tingkat kabupaten, provinsi dan pusat melalui mekanisme seleksi.
- g. Mengikutisertakan pengurus, kader, dan simpatisan dalam seminar, pelatihan, dan diskusi diluar partai.
- h. Memberikan beasiswa ataupun bantuan pendidikan terhadap pengurus dan kader yang berprestasi dan loyal terhadap partai.
- i. Memberikan informasi terbaru yang berkaitan dengan politik, dan pembangunan terhadap kader dan pengurus serta simpatisan.
- j. Membina dan menjalin hubungan harmonis dengan sesama pengurus, kader dan simpatisan secara intern maupun ekstern guna mendukung kebijakan partai dan pemerintah.

Hal ini senada dengan ranah atau esensi Pendidikan Kewarganegaraan yang mencakup pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), keterampilan kewarganegaraan (*civic skill*), partisipasi kewarganegaraan (*civic partisipation*), dan watak/keterampilan/sikap kewarganegaraan (*civic disposition*). Disamping mempersyaratkan pengetahuan dan kemampuan intelektual, pendidikan untuk warga negara dan masyarakat demokratis harus difokuskan pada kecakapan-kecakapan yang dibutuhkan untuk partisipasi yang bertanggung jawab, efektif, dan ilmiah dalam proses politik pada *civil society*.

Sangat disadari bahwa PDI Perjuangan tidak melaksanakan pendidikan politik secara formal, melainkan dapat menjalankan Pendidikan Kewarganegaraan secara non formal. Dalam hal ini PDI Perjuangan dapat berperan sebagai sumber inspirasi akademik, sarana pendidikan, sarana perubahan perilaku, dan sarana habituasi untuk membangun kebiasaan politik masyarakat yang santun dan bertanggung jawab.

Dengan demikian diharapkan bahwa PDI Perjuangan bisa berjalan beriringan dengan Pendidikan Kewarganegaraan dalam rangka mencapai tujuan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sesuai dengan amanat

Pancasila dan Pembukaan UUD NRI 1945 guna membentuk karakter warga negara Indonesia yang bertanggung jawab terhadap dirinya, Tuhan, keluarga, lingkungan sekitar, masyarakat, pendidikan, bangsa dan negara secara berkesinambungan.

5.4 Rekomendasi

Berdasarkan hasil analisis serta simpulan di atas, maka untuk selanjutnya penulis dapat membuat beberapa rekomendasi terutama yang berkaitan dengan “Membentuk Karakter Bertanggung Jawab Warga Negara melalui Pendidikan Politik (Studi kasus pada partai politik PDI Perjuangan di Kabupaten Sintang)”, adalah sebagai berikut:

5.4.1 Kepada Partai Politik PDI Perjuangan

- a. PDI Perjuangan harus melakukan pendidikan politik kepada pengurus, kader, simpatisan maupun masyarakat luas sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 terutama pada pasal satu, pasal 13, pasal 31.
- b. Dalam rangka melaksanakan pendidikan politik kepada pengurus, kader, simpatisan maupun masyarakat luas, sebaiknya tidak hanya dalam bentuk formal semata berupa pelatihan, seminar maupun diskusi politik, namun bisa juga dalam bentuk informal berupa pemberian informasi politik melalui obrolan kecil di warung kopi, melibatkan pengurus, kader, serta simpatisan muda supaya mereka dapat belajar tentang politik, serta memberikan kepercayaan kepada sesama pengurus, dan kader untuk menduduki jabatan tertentu sesuai dengan kemampuannya masing-masing.
- c. Supaya bisa mencantumkan Pendidikan Kewarganegaraan dalam kurikulum pendidikan politik.

5.4.2 Kepada Masyarakat

- a. Supaya selalu aktif melibatkan diri dalam melaksanakan hak dan kewajibannya dalam bidang politik dan pemerintahan secara suka rela dan penuh tanggung jawab.

- b. Melakukan kontrol terhadap kebijakan partai politik dan kebijakan pemerintah.
- c. Dapat menjaga persatuan dan kesatuan dalam NKRI yang majemuk guna menghindari konflik vertikal dan horizontal yang sewaktu-waktu dapat terjadi.

5.4.3 Kepada Pemerintah

- a. Supaya dapat membuat kebijakan yang berpihak kepada masyarakat secara holistik.
- b. Bekerjasama dengan partai politik dalam rangka mensukseskan pembangunan yang menguasai hajat hidup orang banyak.
- c. Membuat kebijakan yang memberi tempat bagi terlaksananya pendidikan politik di Kabupaten Sintang dan di seluruh wilayah Indonesia.

5.4.4 Kepada Civitas Akademik

- a. Supaya dapat memotivasi diri dalam mengembangkan teori-teori kependidikan yang memberikan tempat terlaksananya pendidikan politik di lingkungan pendidikan dan di lingkungan masyarakat.
- b. Pengembangan teori-teori Pendidikan Kewarganegaraan meminta kesungguhan dan komitmen bersama dari seluruh civitas akademika serta teori Pendidikan Kewarganegaraan yang berbasis kemasyarakatan supaya terus dikembangkan guna membentuk karakter masyarakat Indonesia yang berkarakter terpuji dalam tingkah laku, tutur sapa, dan sopan santun terhadap sesama umat manusia dalam kemajemukan.

5.4.5 Kepada Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian bukanlah sesuatu yang bersifat final, oleh karenanya penulis berharap supaya penelitian ini dapat menjadi tolak ukur sekaligus sebagai inspirasi untuk melakukan penelitian selanjutnya guna menambah khazanah ilmu pengetahuan terutama Pendidikan Kewarganegaraan sebab hasil penelitian yang baik adalah dapat dikembangkan oleh peneliti selanjutnya. Untuk itu, penulis merekomendasikan kepada peneliti selanjutnya supaya dapat kiranya melakukan

penelitian lanjutan tentang pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik guna meningkatkan partisipasi politik warga negara.